

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PELAKU  
RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
KEKERASAN (BEGAL) DI KOTA MAKASSAR  
(Studi Kasus Polrestabes Makassar tahun 2015-2018)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum

Oleh : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ASRULLAH DIMAS**  
NIM : 10400114304  
M A K A S S A R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Asrullah Dimas

NIM : 10400114304

Tempat/ Tgl. Lahir : Bantaeng ,10 Maret 1996

Jurusan : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Monginsidi Baru kota Makassar

Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Makassar  
(Studi kasus Polrestabes Tahun 2015-2018)

Menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buatoleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Samata-gowa,

Penyusun,

**ASRULLAH DIMAS**  
**NIM. 10400114304**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah*, rasa syukur yang sangat mendalam penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada baginda Nabi Muhammad saw, yang membawa kebenaran hingga hari akhir.

Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penulis berharap kehadiran skripsi ini dapat memberi informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini.

Penulis menyadari bahwa tidaklah mudah dalam proses penyelesaian skripsi ini tanpa dukungan dan partisipasi semua pihak, baik dalam doa, motivasi moril maupun materil. Karena itu penulis menyampaikan ucapan teristimewa dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga tercinta khususnya kepada kedua orang tua penulis Mama tersayang **Hasni** dan Papa tersayang **Basir S** mereka yang mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta kasih sayang dan tiada henti memberikan semangat, bantuan materil serta doa restu untuk penulis dari sejak awal melaksanakan studi sampai menyelesaikan studi.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, secara khusus peneliti haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin M.Ag, sebagai selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag, selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan pengembangan lembaga, Bapak Dr. Hamsir, SH.,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
3. Ibu Istiqamah, S.H.,M.H Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Dr. Rahman Syamsuddin S.H, M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, Bapak Dr. H.M Saleh Ridwan, M.Ag sebagai penguji I, Bapak Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. selaku penguji II, Kak Firman dan para staff Akademik, segenap jajaran Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, dan para karyawan Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Ashabul Kahfi, S.H., M.H sebagai pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Rahmatiah HL M.Pd sebagai Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu, membimbing dan membantu penulis dengan sabar hingga bisa menyusun skripsi ini sehingga dapat menjadi bekal dan semoga penyusun dapat amalkan dalam kehidupan di masa depan.

5. Bapak Kombes Pol Wahyu Dwi Ariwibowo,S.IK selaku Kepala Polrestabes Kota Makassar dan Bapak Kopol Jamal Faturahman,S.IK yang telah membantu membimbing dan memotivasi penulis serta memberikan data kasus untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat penulis yang senantiasa mendukung dalam berbagai proses baik didalam maupun di luar kampus.
7. Keluarga Besar Mahasiswa Ilmu Hukum Angkatan 2014 khususnya rekan-rekan kelas Ilmu Hukum H terutama saudaraku Erlan Razak , Fawzi Ali Akbar, Ahmad Zulfikar, dan saudariku Ramlawati Radjab yang tak henti-hentinya selalu memberikan semangat dan membantu dalam menyelesaikan skripsi saya.
8. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Alauddin Debate Asociation, Simposium, Independent Law Student, dan Himpunan Mahasiswa Islam.
9. Teman-teman mahasiswa KKN Angkatan 58 Desa Datara Kec.TompoBulu Kab. Gowa.
10. Serta semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu-persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Penyusun menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga

penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. *Amin*

*Yaa Rabbal Alamin.*

Samata, 17 Februari  
2019

Penyusun,

Asrullah Dimas  
NIM: 10400114304



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
BAB II   TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Kriminologi.....	7
1. Pengertian Kriminologi.....	7
2. Ruang Lingkup Kriminologis .....	10
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum .....	12
1. Pengertian Sosiologi Hukum .....	12
2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum .....	18
C. Residivis .....	22
1. Pengertian Residivis .....	22
2. Penyebab Terjadinya Residivis .....	23
3. Perkembangan Residivis di Indonesia .....	24
D. Begal (Pencurian dengan Kekerasan).....	27

1. Pengertian Begal (Pencurian dengan Kekerasan) .....	27
2. Peraturan Tentang Begal (Pencurian dengan kekerasan) .....	28
3. Begal dalam Pandangan Hukum Islam .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	36
C. Lokasi Penelitian .....	36
D. Sumber Data Penelitian.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	37
F. Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Analisis Sosiologi Hukum Terkait Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kota Makassar .....	41
B. Pandangan Masyarakat dan Instansi Terkait Untuk Meminimalisir Terjadinya Residivis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Kota Makassar .....	50
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## ABSTRAK

**Nama : Asrullah Dimas**

**Nim : 10400114304**

**Jurusan : Ilmu Hukum**

**Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Begal) Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar 2015-2018)**

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana, Tinjauan Sosiologi Terhadap Hukum Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Begal) Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar 2015-2018), pokok masalah tersebut dimasukkan kedalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian yaitu: 1. Bagaimana analisis sosiologi hukum melihat pelaku residivis Tindak Pidana Pencurian (Begal) di Kota Makassar ?, 2. Bagaimana tanggapan Masyarakat terkait peran Instansi terkait meminimalisir Pelaku residivis Tindak Pidana Pencurian (Begal) di Kota Makassar ?

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis empiris. Atau penelitian lapangan Dan penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji stadi dokumen, yakni menggunakan berbagai data skunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli. Pendekatan yuridis normatif ini sesuai undang-undang, teori dan pendapat - pendapat para ahli. Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi dari narasumber/ seseorang terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Analisis sosiologi hukum max weber tentang form of domination yaitu dialektika antara doktrin hukum dan sosiologi, yaitu masyarakat menerima doktrin hukum yang termuat dalam aturan hukum serta penegakan hukum dikota Makassar dengan kultur, patologi, ekonomi serta edukasi yang masih perlu dikembangkan, 2. Masyarakat memandang pendidikan perlu diperoleh tiap masyarakat sehingga nilai dan norma dapat tertanam dalam diri masyarakat dan stigmatisasi yang mendarahdaging dalam masyarakat dapat ditepis oleh edukasi dan pengembangan ekonomi tersebut, 3. Adapun tugas Polrestabes Kota Makassar yaitu memberikan pelayanan informasi demokrasi humas Polresta dan melakukan pembinaan kepada masyarakat. Sedangkan Dilapas Kota Makassar melakukan pembinaan Tahap admisi dan orientasi atau pengenalan sehingga kedua instansi ini dapat meminimalisir pelaku residivis dikota Makassar.

Implikasi dari penelitian ini adalah: Adapun saran yang ingin disampaikan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Masyarakat Kota Makassar agar bisa lebih mengedepankan nilai, norma dan kaidah. 2. Pemerintah lebih memperhatikan warga masyarakat untuk memberikan wadah pekerjaan agar aktivitas bisa dibebankan kemasyarakat sehingga aktivitas komersil itu bisa menunjang nilai ekonomi masyarakat dan potensi kriminal akan berkurang. 3. Penegak hukum seperti kepolisian dan Lapas kelas I Kota Makassar telah memberikan strategi untuk meminimalisir Pelaku residivis tindak pidana pencurian dengan kekerasan namun siklus tahun 2018 tak bisa dibendung maka dari itu kinerja masih perlu ditingkatkan apalagi jam malam yang perlu diperketat penjagaannya.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dan pembangunan masyarakat membawa perubahan sosial, termasuk perubahan nilai, sikap dan pola tingkah laku. Hal ini yang menyebabkan adanya pergeseran pandangan terhadap perbuatan warga masyarakat.

Pergeseran norma-norma dalam masyarakat memicu munculnya berbagai konflik di tengah masyarakat baik itu konflik yang terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok dan konflik antar kelompok masyarakat. Hal tersebut secara langsung ataupun tidak langsung lambat laun akan mengakibatkan rusaknya tatanan masyarakat, di berbagai bidang utamanya dalam hal keamanan warga masyarakat yang hidup di wilayah konflik.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Dalam kurun waktu beberapa tahun ini maraknya kejahatan khususnya pencurian dalam bentuk kekerasan atau ancaman dalam hal ini biasanya kita sebut “Begal” menjadi momok yang menakutkan bagi kalangan masyarakat, hingga adanya sikap was-was bagi pengendara khususnya kaum hawa.

Seiring perkembangan zaman, berbagai macam permasalahan akibat krisis ekonomi serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, baik aparat pemerintah maupun lapisan masyarakat sipil, dan

permasalahan kemiskinan sampai tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Kondisi pelaku kejahatan seringkali dapat dipengaruhi oleh tingkat perekonomian, pendidikan serta iman yang lemah sehingga dengan mudah melakukan tindak kejahatan.

Pada kenyataannya, para pelaku kejahatan sepertinya semakin merajalela. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan namun kejahatan tersebut tidak pernah termakan zaman dari muka bumi, bahkan semakin meningkat cara hidup manusia maupun teknologi semakin canggih pula ragam dan pola kejahatan yang muncul. Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia ini. Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, di mana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedangkan perubahan tata nilai bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada.

Sebenarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pasal yang mengatur hukuman bagi pelaku pencurian dengan kekerasan. Dalam koridor hukum positif, aksi begal biasanya dikenakan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencurian dengan kekerasan dan/atau Pasal 368 KUHP mengenai pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Keberadaan Pasal-Pasal ini sepertinya tidak menimbulkan efek jera sehingga kasus

kejahatan ini bukannya berkurang atau tidak ada sama sekali, bahkan sebaliknya malah bertambah terus setiap tahunnya.<sup>1</sup>

Di sisi lain, , hukuman kurungan atau pembinaan pelaku kejahatan di lembaga pemasyarakatan pun dinilai kurang efektif melihat banyaknya permasalahan internal yang terjadi pada lembaga pemasyarakatan. Beberapa permasalahan yang khas di lembaga pemasyarakatan tidak dapat menghasilkan binaan yang baik pada narapidana, diantaranya persoalan sumber daya yang ada pada lembaga pemasyarakatan, maupun kerusuhan dan konflik internal. Tak jarang pelaku kejahatan yang telah dibina dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan akan melakukan kejahatan kembali dan beberapa kali keluar masuk lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan dikarenakan pembinaan tidak terlaksana secara maksimal.<sup>2</sup>

Residivis merupakan narapidana yang lebih dari dua kali menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan atau narapidana yang melakukan kejahatannya kembali, sehingga terkena hukuman pidana kembali di lembaga pemasyarakatan.

Pengulangan tindak pidana bukanlah hal yang baru dalam dunia hukum, karena dimana ada kejahatan maka disitu ada pengulangan kejahatan. Dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum, bahwa "*Humamum enimestpeccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare*" atau kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Roni. *Jurnal Hirabah (begal) dalam Perspektif islam*. Makassar (alaulah :2018) h. 4

<sup>2</sup> Laily Lolita Sari, *Jurnal Pengaruh harapan terhadap kecenderungan residivis Pada narapidan*. 2017

<sup>3</sup> Farid, Abidin Zainal. *Hukum Pidana I*. (Jakarta: Sinar Grafika. 1995)h. 432.

Pendapat ini dikemukakan untuk menjelaskan betapa pentingnya kedudukan pengulangan tindak pidana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Hal ini terbukti dengan dimasukkannya pengulangan tindak pidana itu kedalam bagian yang esensi dalam ajaran hukum pidana di berbagai Negara. *Residive* terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Sama seperti dalam *concursum relas*, dalam *residive* terjadi beberapa tindak pidana. Namun dalam *residive* telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia, dan juga karena faktor ekonomi, sosial, budaya. Dalam KUHP Indonesia, pengulangan tindak pidana hanya dikenal dalam bentuk residivisme, tanpa menentukan dengan jelas berapa batasan jumlah pengulangan.<sup>4</sup>

Kerangka berfikir diatas, selanjutnya akan dipergunakan sebagai titik tolak dalam membicarakan masalah tindak pidana, khususnya yang berhubungan dengan Pelaku Residive tindak pidana pencurian (begal) di Kota Makassar melalui pendekatan Sosiologi Hukum yaitu suatu kesatuan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai gejala sosial, yang meliputi si pelaku, kejahatan dan reaksi sosial terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan serta secara Yuridis yaitu meninjau putusan dan bedah implementasi pasal terkait pencurian (begal). Dari penjelasan diatas

---

<sup>4</sup> Diatur di dalam Buku II Bab XXXI Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

penulis tertarik untuk mengangkat masalah tentang Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian (Begal) di Kota Makassar.

### **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Fokus Penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang akan diteliti, peneliti memfokuskan pada teori sosiologi Max Weber terhadap kondisi Masyarakat Kota Makassar mengenai Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Begal) di Kota Makassar.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis sosiologi hukum melihat pelaku residivis Tindak Pidana Pencurian (Begal) di Kota Makassar ?
2. Bagaimana tanggapan Masyarakat terkait peran Instansi terkait meminimalisir Pelaku residivis Tindak Pidana Pencurian (Begal) di Kota Makassar ?

### **D. Kajian Pustaka**

Agar dapat menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa literasi yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya sebagai berikut :

Buku Pertama, Dirjosisworo Soedjono, Kriminologi, dalam buku tersebut memuat materi tentang kriminologi dan patologi sosial yang ada dalam masyarakat.

Buku Kedua, Utsman, Sabian. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat membahas tentang beberapa teori sosiologi hukum

yang berkembang dalam masyarakat, sehingga penulis dapat mengambil beberapa teori sosiologi hukum seperti Max weber.

Buku Ketiga, Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, memuat dasar-dasar hukum serta formulasi sosiologi hukum max weber yang menjadi tolak ukur penulis dalam kerangka skripsi ini.

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui analisis sosiologi hukum melihat pelaku residivis Tindak Pidana Pencurian (Begal) di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui Peran Kepolisian meminimalisir Pelaku residivis Tindak Pidana Pencurian (Begal) di Kota Makassar

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah :

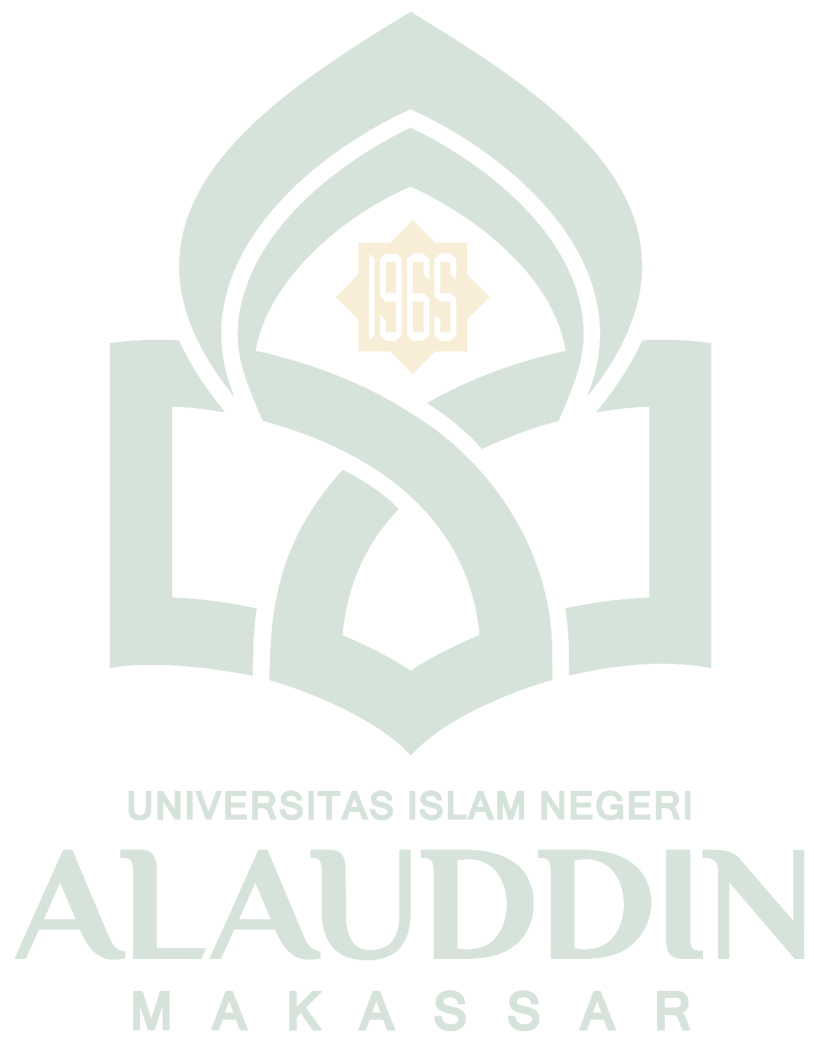
#### **a. Teoretis**

- Memberikan data kepada pembaca tentang tingkat kejahatan dan faktor-faktor penyebab tindak pidana pencurian (begal) di kota Makassar

#### **b. Praktis**

- Untuk mendapatkan data dan informasi sampai sejauh mana upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian (pelaku residivis)
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Instansi yang dimaksud penulis dalam hal ini adalah pihak Kepolisian, dalam mengatasi tindak pidana pencurian (pelaku residivis)

- Sebagai suatu karya yang diharapkan dapat bermanfaat bagimasyarakat, bangsa dan Negara.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Dari segi etimologis istilah kriminologis terdiri atas dua suku kata yakni *crimes* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan jadi menurut pandangan etimologi maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang di lakukannya.

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. memberikan definisi kriminologi adalah :<sup>5</sup> “Pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat, perbaikan maupun pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan secara lebih luas lagi.”

zG.P. Hoefnagelmengemukakan, bahwa :<sup>6</sup>

“Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas dan deksiminalisasi, situasi kejahatan-penjahat-masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan serta reaksi-reaksi dan responrespon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak di luar penjahat itu sendiri.”

---

<sup>5</sup> Dirjosisworo Soedjono, *Kriminologi (pencegahan tentang sebab- sebab Kejahatan)*, 1985,h.24

<sup>6</sup> Mulyana W.Kusuma, *Kriminologi dan masalah Kejahatan*. (Armico: Bandung 1984).h. 20

Lanjut Paul Moedigdo Meolionomemberikan definisi kriminologi :<sup>7</sup>

“Sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial. Karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia.”

Selanjutnya W.A.Bongermembagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup :<sup>8</sup>

1. *Antropologi Kriminal* ; adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis).
2. *Sosiologi Kriminal* ; adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
3. *Psikologi Kriminal* ; adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.
4. *Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal* ; adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
5. *Penologi* adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis dapat melihat penyisipan kata kriminologi sebagai ilmu menyelidiki mempelajari. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Jadi kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (*etiologi*, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan.

<sup>7</sup> Santoso T dan Zulfa E.A. *Kriminologi*.(Jakarta :Grafindo Persada .2001.)h. 11

<sup>8</sup> Santoso T dan Zulfa E.A. *Kriminologi*.(Jakarta :Grafindo Persada .2001.)h.9-10

Selanjutnya untuk memberikan pengertian yang lebih jelas mengenai kriminologi, penulis akan menguraikan lebih lanjut beberapa pengertian mengenai kejahatan.

Seperti dikatakan bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan, maka timbul pertanyaan sejauh manakah suatu tindakan dapat disebut kejahatan ? Secara formal kejahatan dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana (*Misdaad is een ernstige anti sociale handeling, seaw tegen de staat bewust reageer*).

Dalam hal pemberian pidana ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu adalah ketertiban masyarakat dan masyarakat menjadi resah. Terkadang tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, yang dimana masyarakat bersifat dinamis, maka tindakan pun harus dinamis sesuai dengan irama perubahan masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh faktor waktu dan tempat. Masyarakat menilai dari segi hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi (pergaulan) bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan yuridis. Sebaliknya bisa terjadi suatu tindakan dilihat dari segi sosiologis merupakan kejahatan, sedang dari segi yuridis bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan sosiologis (kejahatan kriminologis).

Usaha untuk merumuskan dan mendefinisikan kejahatan dalam kriminologi hampir setara bidang pengetahuan ilmiah itu sendiri. Hal itu menyangkut sejumlah pendapat-pendapat kontroversial dan beberapa benturan pendapat ilmiah yang pada dasarnya merupakan bagian proses perkembangan suatu ilmu. Kejahatan pada mulanya tidak secara resmi dirumuskan dan tidak menyangkut suatu tindakan resmi

terhadapnya, melainkan hanya merupakan masalah pribadi. Seorang yang melakukan kesalahan memperoleh pembalasan baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap keluarganya.

## 2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kejahatan kekerasan, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang arti kejahatan itu sendiri.

Menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa :<sup>9</sup>

“Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keteranganketerangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.”

Berbicara masalah kriminologi tentu tidak terlepas dari bahasan tentang ruang lingkup kejahatan. Berikut di bahas mengenai kejahatan.

---

<sup>9</sup> Santoso T dan Zulfa E.A.. *Kriminologi*. (Jakarta :Grafindo Persada. 2001)

## B. Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

### 1. Pengertian Sosiologi Hukum

Dari sudut sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Hasil-hasil pemikiran tersebut tidak saja berasal dari individu-individu tetapi mungkin juga berasal dari mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli pemikir yang secara garis besar mempunyai pendapat yang berbeda. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku (artinya isi dan bentuknya yang berubah-ubah menurut waktu dan tempat) dengan bantuan faktor-faktor kemasyarakatan.<sup>10</sup>

Sosiologi Hukum adalah cabang kajian khusus dalam keluarga besar ilmu-ilmu sosial yang disebut Sosiologi. Kalaupun Sosiologi Hukum juga mempelajari hukum sebagai seperangkat kaidah khusus, maka yang dikaji bukanlah kaidah-kaidah itu sendiri melainkan kaidah-kaidah positif dalam fungsinya yang diperlukan untuk menegakkan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat dengan segala keberhasilan dan kegagalanya.<sup>11</sup>

Dibalik semua itu, tidak perlu dipertentangkan konsepsi dasar bagaimana Hukum ataupun Sosiologi mendeterminasi setiap pemahaman yang berlaku didalam terminologi masing-masing. Ada kekhawatiran akan muncul segmentasi metodologis

---

<sup>10</sup> Yesmil Anwar dan Adang, , Pengantar Sosiologi Hukum, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008 h.109.

<sup>11</sup> Wignjosebroto, Soetandyo.. *Hukum: Paradigma, Metode Dan Masalah. Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologi (Huma)*. Jakarta Zaini, 2002, hlm 213

yang semakin membuka jarak egosentris kedua disiplin tersebut semakin melebar. ada pemaknaan yang sangat berarti ketika konstruksi pemahaman Sosiologi Hukum dibangun dengan mengakulturasikan hukum pada ranah substansi sementara Sosiologi berada pada metodologi yang saling terkait. Alhasil, Sosiologi Hukum sebagai suatu disiplin yang mandiri tidak akan terdeterminasi oleh Hukum maupun Sosiologi bahkan termarginalkan tapi sebaliknya mampu menjadi disiplin yang memiliki integritas dan kerangka pikir yang konstruktif serta metodologi yang semakin baik. Sering yang terjadi pada kajian-kajian yang selalu menafsir secara subjektifitas integritas dari Sosiologi Hukum, sebagaimana diikuti

Ada beberapa faktor sebagai penyebab kurangnya perhatian para Sosiolog terhadap hukum ,<sup>12</sup>

1. Para Sosiolog mengalami kesulitan untuk menyoroti sistem hukum semata-mata sebagai himpunan kaedah-kaedah yang bersifat normatif sebagaimana halnya dengan para yuris. Para Sosiolog sulit menempatkan diri dalam normatif karena Sosiologi merupakan suatu disiplin yang kategoris.
2. Pada umumnya para Sosiolog dengan begitu saja menerima pendapat bahwa hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang statis. Hal ini tercermin pada pertanyaan-pertanyaan yang biasanya diajukan para ahli hukum; hukum apakah yang mengatur Perpajakan, hukum apakah yang mengatur penanaman modal asing dan lain sebagainya.

---

<sup>12</sup> Mastur, Sh,Mh,. *Peranan Dan Manfaat Sosiologi Hukum Bagi Aparat Penegak Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti*, Fak. Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang 2013. hlm 67

3. Sosiolog sering mengalami kesulitan untuk menguasai keseluruhan data tentang hukum yang demikian banyaknya yang pernah dihasilkan oleh beberapa generasi ahli-ahli hukum.
4. Lambatnya perkembangan Sosiologi Hukum adalah kesulitan-kesulitan terjadinya hubungan antara para Sosiolog dengan para ahli hukum karena kedua belah pihak tidak mempergunakan bahasa dan kerangka pemikiran yang sama.

Sosiologi Hukum diperlukan dan bukan merupakan penanaman yang baru bagi suatu ilmu pengetahuan yang telah lama ada. Dalam kajian Soejono Soekanto, suatu fakta yang merupakan penghalang besar terhadap hubungan antara Sosiologi dengan Hukum dan pada akhirnya menyebabkan lambatnya perkembangan Sosiologi Hukum adalah kesulitan-kesulitan terjadinya hubungan antara para Sosiolog dengan para ahli hukum, karena kedua belah pihak tidak mempergunakan bahasa dan kerangka pemikiran yang sama.

Bahasa yang dimengerti oleh pihak-pihak yang mengadakan hubungan, merupakan suatu persyaratan mutlak bagi terjadinya dan berhasilnya komunikasi antara pihak-pihak tersebut. Hal itu menyebabkan ketidakpastian pada pihak-pihak yang mengadakan hubungan, sehingga sulit untuk mengadakan pendekatan yang interdisipliner. Sulitnya komunikasi antara seorang Sosiolog dengan ahli hukum dipertajam dengan kenyataan, bahwa masing-masing mempunyai pusat perhatian yang berbeda.

Sosiologi Hukum sebagai ilmu pengetahuan, maka haruslah berbeda dengan pengetahuan yang non-ilmiah, untuk itu Sosiologi Hukum sebagai ilmu pengetahuan memiliki konsekuensi yang harus dipenuhi yaitu:

1. Sosiologi Hukum harus memiliki proses yang merupakan aktivitas penelitian, yang terdiri dari rasional, kognitif, dan teleologis.
2. Sosiologi Hukum harus memiliki aktivitas berupa metode ilmiah paling tidak menyangkut pola-pola, analitis, penggolongan, perbandingan dan survey.
3. Sosiologi Hukum sebagai ilmu harus merupakan produk pengetahuan yang sistematis .<sup>13</sup>

Untuk lebih mengkonseptualisasikan Sosiologi Hukum, kita perlu mengadopsi beberapa pengertian Sosiologi Hukum dari beberapa ahli terkemuka;

1. Soejono Soekanto Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.
2. Satjipto Raharjo Sosiologi Hukum ( Sociology of Law ) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.
3. R. Otje Salman Sosiologi Hukum adalah ilmu yan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis
4. H.L.A. Hart menurut Hart, suatu konsep hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan masyarakat .<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat. Pustaka Pelajar*. Yogyakarta 2013.. Hlm 87

<sup>14</sup> Ali, Prof. Dr. H. Zainuddin.. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Anwar, Yesmil. 2008. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta. Grasindo, 2005. Hlm 1



5. C.J.M. Schuyt, mengemukakan bahwa yang menjadi pusat perhatiannya adalah peranan hukum di dalam masyarakat dalam hal pertahanan pembagian kesempatan hidup serta bagaimana peranan nisbi hukum untuk mengubah pembagian yang tidak merata, dan pembagian kesempatan hidup itu sendiri tidak bisa terlepas dari adanya struktur kelas di dalam masyarakat sehingga karenanya muncullah persoalan ketidakadilan dan ketidakmerataan.

*“Salah satu tugas sosiologi hukum tidak lain dengan mengungkapkan sebab musabab ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan tata tertib masyarakat dalam kenyataan”*<sup>15</sup>

6. George Gurvitch (1961) seorang professor terkemuka bidang Sosiologi Hukum yang berasal dari Universitas Sorbonne, secara runtut mendefenisikan sebagai berikut:

*“ Sosiologi hukum ialah bagian dari sosiologi umat manusia yang menelaah kenyataan social sepenuhnya dari hukum, mulai dengan pernyataan yang nyata dan dapat diperiksa dari luar , dalam kelakuan kolektif yang efektif. Sosiologi hukum menafsirkan kelakuan dan manifestasi material hukum ini menurut makna batinnya seraya mengilhami, Sosiologi Hukum khususnya bertindak dari pola hukum ke lamban g yang ditetapkan sebelumnya, seperti hukum, prosedur dan saksi-saksi yang re-organisasi, sampai pada lambang - lambang hukum semata, seperti peraturan yang mudah menyesuaikan diri dan hukum yang serta merta. dari yang tersebut belakangan ini Sosiologi Hukum bertindak kepada nilai-nilai dan gagasan hukum, dan kepada kepercayaan serta lembaga-lembaga kolektif yang bercita-cita akan nilai ini dan*

---

<sup>15</sup> Utsman, Sabian.. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2013, Hlm 2*

*memahami gagasan ini dan mewujudkan dirinya dalam fakta - fakta normative yang serta merta sumber kesahan (validity), yakni keabsahan dari kepositifan segala hukum”<sup>16</sup>*

Menurut Achmad Ali, yang mengutip dari Friedman, sosiologi hukum beranjak dari asumsi dasar

*“...The people who make, apply, or use the law are human being. Their behavior is social behavior. Yet, the study of law has proceeded in relative isolation from other studies in the social sciences...”*

Asumsi dasar tersebut beranggapan bahwa orang yang membuat, yang menerapkan, atau yang menggunakan hukum adalah manusia. Perilaku mereka adalah perilaku sosial. Namun kajian hukum secara relatif telah memisahkan diri dari studi- studi lain di dalam ilmu sosial. Selanjutnya, Achmad Ali mengatakan bahwa dengan menggunakan pandangan-pandangan sosiologi terhadap hukum, kita akan menghilangkan kecenderungan untuk senantiasa mengidentikkan hukum sebagai undang-undang belaka (seperti yang dianut oleh kalangan kaum positivistic atau legalistic).

Sosiologi hukum merupakan teori tentang hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan. Hubungan hukum dapat dipelajari dengan dua cara yaitu :

1. Menjelaskan kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan; dan
2. Menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah- kaidah hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Utsman, Sabian.. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2013,Hlm 1*

## 2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum sebagai ilmu yang mempelajari fenomena hukum. Dari sudut pandang yang demikian itu, Satjipto Rahardjo memberikan beberapa karakteristik studi secara sosiologis, sebagai berikut:

1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu dibedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktek yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan, mengapa praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebanya, faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, latar belakangnya dan sebagainya. Dengan mengutip Weber, Satjipto mengemukakan tujuan untuk memberikan penjelasan ini memang agak asing kedengarannya bagi study hukum “tradisional” yaitu yang bersifat preskriptif, yang hanya berkisar pada “apa hukumnya” dan “bagaimana penerapannya”. Cara pendekatan yang demikian itu oleh Max Weber disebutkan sebagai suatu “interpretative understanding”, yaitu dengan cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek dari tingkah laku sosial. Dengan demikian menurut Satjipto, mempelajari hukum secara sosiologis adalah menyelidiki tingkah laku manusia dalam hukum. Oleh Weber, dikatakannya tingkah laku hukum itu mempunyai dua segi yaitu, segi “luar” dan segi “dalam”. Dengan demikian sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin juga memperoleh

---

<sup>17</sup> H. Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. Pertama, , 2010 h.65.

penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Apabila di sini disebut tingkah laku (hukum), maka sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan yang menyimpang. Kedua-duanya merupakan obyek pengamatan dan penyelidikan ilmu ini.

2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (empirical validity) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pernyataan yang bersifat khas di sini adalah “Bagaimanakah dalam kenyataan peraturan itu?”, “Apakah kenyataannya seperti yang tertera pada bunyi peraturan itu?”. Perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan sosiologis adalah, bahwa yang pertama menerima saja apa yang tertera pada peraturan hukum, sedang yang kedua senantiasa mengujinya dengan data (empiris).
3. Sosiologi hukum tidak melakukan ”penilaian” terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan obyek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap obyek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktek-praktek yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan di sini, bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi obyektifitasnya semata-mata

dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.<sup>18</sup>

Dengan berpedoman pada persoalan-persoalan yang disoroti sosiologi hukum maka dapatlah dikatakan, bahwa sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum, dan sebaliknya. Perihal perspektif dari sosiologi hukum secara umum ada dua pendapat utama, sebagai berikut :

1. Pendapat-pendapat yang menyatakan, bahwa sosiologi hukum harus diberikan suatu fungsi yang global. Artinya, sosiologi hukum harus menghasilkan suatu sintesa antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan sebagai sarana dari keadilan. Di dalam fungsinya itu, maka hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak kecil dari sosiologi hukum di dalam mengidentifikasikan konteks sosial di mana hukum tadi diharapkan berfungsi.
2. Pendapat-pendapat lain menyatakan, bahwa kegunaan sosiologi hukum justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan.

Perihal proses pengkaidahan, maka sosiologi hukum dapat mengungkapkan data tentang keajegan-keajegan mana di dalam masyarakat yang menuju pada pembentukan hukum (baik melalui keputusan penguasa maupun melalui ketetapan bersama dari para warga masyarakat, terutama yang menyangkut hukum fakultatif). Dari batasan, ruang lingkup maupun perspektif sosiologi hukum sebagaimana

---

<sup>18</sup> OK. Khairuddin, 1991, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, h.38-39.

dijelaskan di atas dapat dikatakan, bahwa secara ideal sosiologi hukum dapat berguna untuk :

1. Memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial. Misalnya, kemampuan untuk memahami sampai sejauh manakah pengaruh timbal balik antara hukum sebagai kompleks daripada sikap-sikap atau perilaku, dengan perilaku-perilaku sosial lainnya dalam masyarakat.
2. Mengadakan analisa terhadap efektifitas hukum tertulis. Misalnya, bagaimana mengusahakan agar suatu undang- undang melembaga dalam masyarakat.
3. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan- keadaan sosial tertentu.
4. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum di dalam masyarakat.

### **C. Residivis**

#### **1. Pengertian Residivis**

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kejahatan kekerasan, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang arti kejahatan itu sendiri.

Pengulangan atau residivis terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan mana satu atau lebih telah di jatuhi hukuman oleh pengadilan <sup>19</sup>

Menurut sifatnya perbuatan yang merupakan sebuah pengulangan dapat dibagi menjadi dua jenis , yaitu ;<sup>20</sup>

a. Residive umum :

- 1) Seseorang yang telah melakukan kejahatan.
- 2) Dimana perbuatan yang telah dilakukan sudah dijatuhi hukuman yang telah di jalani.
- 3) Kemudian ia kembali melakukan kejahatan setiap jenis kejahatan.
- 4) Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukum.

b. Residivis khusus :

- 1) Seseorang yang telah melakukan kejahatan.
- 2) Yang telah dijatuhi hukuman.
- 3) Setelah ia menjalani hukuman kembali melakukan kejahatan.
- 4) Kejahatannya yang dilakukan kembali adalah sejenis. Dari perbuatan yang dilakukan diatas perbuatan yang sejenis hal untuk dilakukan pemberatan akan hukumannya.

Etologi psikopatologi secara umum dijelaskan oleh Maxmen Jerrold yaitu ;<sup>21</sup>

a. Mekanisme pertahanan

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, , *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2010).h.121

<sup>20</sup> Teguh Prasetyo, , *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2010).Hal. 123

<sup>21</sup> Maxmen, Jerrold S.. *Essential Psychopathologi*. (New York: W. W. Norton & Company. 1986 ) h. 67-68

- b. Konflik intrapsikis
- c. Tingkah laku
- d. Sistem keluarga
- e. Sosiokultur

## **2. Penyebab Timbulnya Residivis**

### **a. Lingkungan Masyarakat**

Respon dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakat kemudian menimbulkan stigmatisasi terhadap individu yang melakukan perilaku yang menyimpang tersebut. Stigmatisasi sebagai mana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah orang yang jahat.

### **b. Dampak dari Prisonisasi**

Pada saat dicetuskannya sistem pemasyarakatan pada tahun 1963 oleh Sahardjo salah satu asumsi yang dikemukakan adalah bahwa Negara tidak berhak membuat orang lebih buruk atau jahat sebelum dan di penjara, asumsi ini secara langsung menunjukkan pengakuan terhadap pemenjaraan secara potensial dapat menimbulkan dampak negatif, sebagaimana yang dinyatakan dalam Poin 53, Implementasi The Standar Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners (Implementasi SMR).

## **3. Perkembangan Residivis di Indonesia**

KUHP tidak mengatur secara jelas mengenai pengertian dari pengulangan kejahatan (residive), namun hanya beberap pasal saja yang mengatur mengenai pemberatan terhadap narapidana yang melakukan pengulangan



kejahatan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia sampai saat ini juga belum ada regulasi yang legal mengatur secara jelas tentang pengulangan kejahatan tersebut. Namun dalam perkembangannya, pengulangan tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu :

- a. Pengulangan tindak pidana menurut ilmu kriminologi, dibagi dalam penggolongan pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan, yaitu :
  - 1) Pelanggar hukum buka residivis (*mono deliquent*/pelanggar satu kali) yaitu yang melakukan hanya satu tindak pidana dan hanya sekali saja.
  - 2) Residivis yang dibagi lagi menjadi :
    - a) Penjahat yang akut meliputi pelanggar hukum yang bukan residivis dan mereka yang berkali-kali telah dijatuhi pidana umum namun antarmasing-masing putusan pidana jarak waktunya jauh, atau perbuatan pidananya begitu berbeda satu sama lain sehingga tidak dapat dilakukan ada hubungan kriminalitas atau dengan kata lain dalam jarak waktu tersebut (misalnya 5 (lima) tahun menurut Pasal 486, 487, dan 488 KUHP Indonesia atau 2 (dua) tahun menurut Pasal 45 KUHP Indonesia)
    - b) Penjahat kronis, adalah golongan pelanggar hukum yang telah mengalami penjatuan pidana yang berlipat ganda dalam waktu singkat di antarmasing-masing putusan pidana.

- c) Penjahat berat, yaitu mereka yang paling sedikit telah dijatuhi pidana 2(dua) kali dan menjalani pidana berbulan-bulan dan lagi mereka yang karena kelakuan anti sosial sudah merupakan kebiasaan atau sesuatu yang telah menetap bagi mereka.
- d) Penjahat sejak umur muda. Tipe ini memulai karirnya dalam kejahatan sejak ia kanak-kanak dan dimulai dengan melakukan kenakalan anak.

Kritikan tersebut dapat berpengaruh besar terhadap proses pembuatan rancangan KUHP yang telah rampung pada tahun 2000 yang lalu dan telah disosialisasikan sejak bulan Desember Tahun 2000. Dari sudut ilmu pengetahuan pidana, pengulangan tindak pidana dibedakan atas 3 (tiga) jenis, yaitu :

- a. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan cakupannya antara lain :
  - 1) Pengertian yang lebih luas yaitu bila meliputi orang-orang yang melakukan suatu rangkaian kejahatan tanpa diselingi suatu penjatuan pidana.
  - 2) Pengertian yang lebih sempit yaitu bila si pelaku telah melakukan kejahatan yang sejenis (*homologus recidivism*) artinya ia menjalani suatu masa pidana tertentu dan ia mengulangi perbuatan sejenis tadi dalam batas waktu tertentu misalnya 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

b. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan sifatnya antaralain :

- 1) *Accidentale recidive* yaitu apabila pengulangan tindak pidana yang dilakukan merupakan akibat dari keadaan yang memaksa dan menjepitnya.
- 2) *Habituele recidive* yaitu pengulangan tindak pidana yang dilakukan karenasi pelaku memang sudah mempunyai *inner criminal situation* yaitu tabiatjahat sehingga kejahatan merupakan perbuatan yang biasa baginya.

c. Selain kepada kedua bentuk di atas, pengulangan tindak pidana dapat jugadibedakan atas :

- 1) Residiv umum, yaitu apabila seorang melakukan kejahatan yang telahdikenai hukuman, dan kemudian ia melakukan kejahatan pidana dalambentuk apapun maka terhadapnya dapat dikenakan pemberatan hukuman.
- 2) Residiv khusus, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan yang telahdikenai hukuman, dan kemudian ia melakukan kejahatan pidana yangsama (sejenis) maka kepadanya dapat dikenakan pemberatan hukuman.<sup>22</sup>

#### **D. Begal (Pencurian dengan Kekerasan)**

##### **1. Pengertian Begal**

“Begal” merupakan kata kerja, sinonim kata begal adalah kata penyamun, sementara kata “pembegalan” adalah proses, cara, perbuatan yang berarti

---

<sup>22</sup> Frenrich Stumpl dikutip oleh Stephen Hurwitz dalam bukunya *Kriminologi Sansuran* Ny. L. Moeljatno, h. 161.

perampasan atau perampokan.<sup>23</sup> Secara terminologi kata begal dapat diartikan sebagai sebuah aksi kejahatan (kriminal) seperti perampokan/perampasan yang dilakukan oleh seseorang disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dan menggunakan kendaraan bermotor bahkan biasa sampai melakukan pembunuhan terhadap korban dan korban yang disasar biasanya pengendara sepeda motor. Jadi Begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam.

Aksi begal jelas mengganggu keamanan masyarakat (*public security*) dan bahkan mengancam keamanan insani (*human security*). Istilah “begal” merupakan istilah yang hanya muncul di masyarakat Indonesia saja. Salah satu dampak adanya kasus pembegalan yaitu memasuki tahun 2015, masyarakat dikejutkan dengan makin maraknya tindak kejahatan perampasan.

## **2. Peraturan Tentang Begal (Pencurian dengan kekerasan)**

Pencurian dengan kekerasan berdasarkan ketentuan pasal 365 (1) KUHPidana yaitu pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menurut Pasal 89 KUHPidana kekerasan disamakan dengan perbuatan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Adapun pendapat para ahli mengenai kekerasan yaitu:

---

<sup>23</sup> Kamus besar Bahasa Indonesia

- a. Simons, dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.<sup>24</sup>
- b. S.R. Sianturi, kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi.<sup>25</sup>
- c. R. Soesilo, melakukan kekerasan artinya, mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengantangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang danlain sebagainya.<sup>26</sup>

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikenal oleh masyarakat dengan istilah perampokan atau dalam hal penulisan ini yang mana kajian objeknya adalah sepeda motor dikenal dengan istilah pembegalan. Pembegalan adalah istilah tindak pidana pencurian terhadap kendaraan bermotor dengan menggunakan unsur kekerasan. Istilah pembegalan walaupun tidak dikenal dalam KUHPidana namun unturnya sebagai tindak pidana jelas ada, sehingga patut ditindak secara hukum.

Penjelasan tentang tindak pidana pencurian dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 362-367 KUHPidana yaitu:

- a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHPidana), yaitu:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana

---

<sup>24</sup> Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, ( Jakarta, Sinar Grafika, 2009), h. 58

<sup>25</sup> S.R. Sianturi, , Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta, Alumni Ahaem- Petehean, 1986)

<sup>26</sup> R. Soesilo, KUHP dan Komenta-Komentarnya Lengkap, (Bogor : Politei. 1996)

denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu:

1) .Unsur objektif, terdiri dari:

- a) Perbuatan mengambil
- b) Objeknya suatu benda
- c) Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

2) Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:

- a) Adanya maksud
- b) Yang ditujukan untuk memiliki
- c) Dengan melawan hukum

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.<sup>27</sup>

b. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi (Pasal 363 KUHPidana), yaitu:

Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat. Karena pencurian ini dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Pasal 363 KUHPidana berbunyi:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang : Bayu Media.2003,)h. 5.

- a) Pencurian ternak
  - b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
  - c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
  - d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
  - e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- c. pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana), yaitu:
- “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana), yaitu:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  - a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan.;
  - b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - c) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakia anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.



- e. Pencurian dengan pidana penjatuan pencabutan hak (Pasal 366 KUHPidana) yaitu:

“Dalam hal pembedaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 no. 1-4.

- f. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana), yaitu:

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

### 3. Begal dalam Pandangan Hukum Islam

Di dalam hukum pidana Islam tindak pidana perampokan diatur dalam Fikih Jinayah pada Bab hudud pada urutan keempat, yakni kejahatan hirâbah atau qath' al-thâriq. Para fukaha sepakat bahwa hirâbah adalah mengangkat senjata dan

mengganggu lalu lintas di luar kota<sup>28</sup>. Hirâbah atau perampokan dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian dalam arti majazi, bukan dalam arti hakiki. Secara hakiki pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam. Sedangkan perampokan adalah pengambilan harta secara terang-terangan dan kekerasan,<sup>29</sup> sehingga dengan demikian hirâbah (perampokan) dapat disebut dengan istilah siraqah kubrâ (pencurian berat).

Hirâbah (perampokan) dinamakan dengan pencurian besar/berat, karena dampak mudharatnya, tidak hanya menimpa para pemilik harta yang dirampas saja, akan tetapi juga menimpa semua masyarakat secara umum. Dengan demikian, ancaman hukuman/sanksi hadd-nya diperberat. Perbedaan yang esensial antara pencurian dengan perampokan terletak pada cara pengambilan harta, yaitu pada jarîmah pencurian mengambil barang secara diam-diam, sedangkan jarîmah perampokan mengambil barang itu dengan cara terang-terangan dan disertai dengan kekerasan.

Adapun teknis operasional perampokan menurut A. Djazuli terdapat empat kemungkinan. Pertama, seseorang pergi dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi, namun orang tersebut tidak mengambil harta dan tidak membunuh. Kedua, seseorang berangkat dengan niat untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kemudian mengambil harta tersebut, tetapi tidak membunuh. Ketiga, seseorang berangkat dengan niat merampok, kemudian membunuh, tapi tidak mengambil harta korban. Keempat,

---

<sup>28</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said, dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 663.

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 93.

seseorang berangkat untuk merampok kemudian orang tersebut mengambil harta dan membunuh pemiliknya<sup>30</sup>.

Keempat penjelasan tersebut di atas semuanya termasuk perbuatan perampokan selama yang pelakunya itu berniat untuk mengambil harta dengan terang-terangan. Keempat penjelasan tersebut di atas, maka para ulama terdapat beberapa perbedaan memberikan redaksi definisi tentang perampokan tersebut. Namun sebenarnya inti persoalannya adalah sama. Hal ini dapat dilihat di bawah ini, di antaranya, pertama, Ulama Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, memberikan definisi hirâbah adalah:

“Hirâbah... adalah ke luar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut- nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang.<sup>31</sup> Kedua, ulama Syâfi’iyah memberikan definisi hirâbah adalah sebagai berikut:

“Hirâbah... adalah ke luar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara ke- kelasan, dengan berpegang kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan)<sup>32</sup>.

Adapun dasar Alquran tentang Hirabah yaitu pada surah al-maidah : 33

ضُرِّلَا فِي فَنَوْعَسِيَوُ هَلُوَسَرَوُ اَلله نَوُبِرَا حِي نِيْذَلَا ءَاَزَج اَمْنَا  
نَم مُهْلَجَرَاو مُهْيَدِيَا عَطَقْت وَا اَوْبُلْصِي وَا اَوْلَتَقِي نَا اَدَاَسَف  
ي فَمُهْلَو اَيْنْدَلَا ي فَيَزِدْ مُهْلَا كِلْذ ضُرْلَا نَم اَوْقَنِي وَا فِلَاخ  
٣٣) مِيْظَعُ بَاَدْعِ قَرِخَلَا

<sup>30</sup> A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), h. 97.

<sup>31</sup> Abd al-Qâdir Awdah, Al-Tasyrî al-Jinâ'î al-Islâmî, Juz II, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, t.th), h. 639.

<sup>32</sup> Abd al-Qâdir Awdah, Al-Tasyrî al-Jinâ'î al-Islâmî, Juz II, h. 640.

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,"(QS Al Maidah : 33)

Kerusakan yang mereka perbuat di muka bumi bukan berarti pada kerusakan benda, melainkan menghasut orang-orang kafir untuk memusuhi dan menentang orang-orang Islam.

نَوْرُ عَشِيٍّ لَا تَنْكَلُوْا نَوْدِسْقُمْ اَمْ هُمْ هٰهٰنَا لَا اَ

"Ingatlah, Sesungguhnya mereka Itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.( Albaqarah :12)

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dan penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji stadi dokumen, yakni menggunakan berbagai data skunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, Kepolisian, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Dan data lain yang diperoleh dilapangan untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dan kasus cara pendekatan ini sesuai dengan undang-undang, teori dan pendapat -pendapat para ahli. Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi dari narasumber/ seseorang terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Polrestabes dan Lapas Kelas I Kota Makassar dan Daerah Sosial Masyarakat Kota Makassar (diambil dari sampel laporan residivis Polrestabes Kota Makassar). Lokasi tersebut menjadi pilihan Penulis sebab terdapat beberapa data dan pendapat narasumber yang bisa dijadikan bahan kajian serta penelitian dengan tinjauan Krimino-Yuridis.

#### **D. Sumber Data Penelitian**

Sumber data pada penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari wawancara yang dilakukan langsung kepada narasumber.

2. Data Skunder

Data sekunder berupa semua data yang berhubungan dengan kajian yang dibahas selain dari sumber data primer yang disebutkan sebelumnya, baik berupa buku, jurnal, artikel-artikel baik dalam media massa maupun elektronik yang berada dalam situs-situs internet dan data lain yang terjadi di lapangan yang relevan guna membantu menyelesaikan persoalan dalam kajian penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui pendapat, keyakinan, perasaan. Wawancara akan dilakukan kepada narasumber yang selaku aparat Kepolisian dan Lapas Kota Makassar. Wawancara dilakukan Penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

2. Observasi

Observasi merupakan usaha untuk mengumpulkan data-data melalui pengamatan yang cermat dilapangan. Observasi dilakukan secara langsung karena Penulis ingin memperoleh data secara akurat.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode dengan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data lengkap, sah bukan berdasarkan perkiraan. Dalam penelitian sosial fungsi data berasal dari dokumentasi lebih banyak yang digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap data primer.<sup>33</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Agar data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahan yang akurat, maka penulis menggunakan metode pengelolaan dan analisis data dengan cara kualitatif yaitu dengan mengambil data hasil teknik pengumpulan data kemudian dilakukan klarifikasi dan pengelompokkan data yang sesuai dengan permasalahan yang ingin dikaji. Adapun data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode pengelolaan dan analisis data, pada metode ini .

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan peneliti dalam wawancara studi kepustakaan dan dokumen, maupun dokumen untuk mendapatkan data yang lengkap.

### 2. Reduksi Data

---

<sup>33</sup>Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 158.

Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus selama proses kualitatif berlangsung. Reduksi data bukanlah hal yang terpisah dari analisis pilihan-pilihan penelitian tentang data mana yang dikode dan mana yang dibuang semua itu adalah pilihan-pilihan analisis. Reduksi data bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan verifikasi.

### 3. Penyajian Data

Seluruh data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dari data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menuliskan, menjelaskan, dan memaparkan Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Pelaku Residivis Begal (pencurian dengan kekerasan) di Kota Makassar guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan penarikan inti dari suatu data yang telah terkumpul pada suatu proses penelitian yang telah dilaksanakan sehingga hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut memperoleh kesimpulan atau verifikasi akhir.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Analisis Sosiologi Hukum Terkait Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kota Makassar

Penganut aliran sosiologis di bidang ilmu hukum, dapat dibedakan antara yang menggunakan *sociology of law* sebagai kajiannya, dan yang menggunakan *sociological jurisprudence* sebagai kajiannya. *Sociology of law* lahir di Italia, dan pertama kali dikenalkan oleh Anzilotti, olehnya itu berkonotasi Eropa Daratan, sedangkan *sociological jurisprudence* berasal dari pemikiran orang Amerika bernama Roscoe Pound olehnya itu berkonotasi Anglo Saxon.

*Sociology of law* adalah sosiologi tentang hukum, yang merupakan cabang sosiologi, dengan melihat bahwa hukum merupakan bagian dari masyarakat yang ada. Hukum menjadi variabel dalam masyarakat bersama-sama dengan variabel lainnya. Yang pertama-tama dilihat adalah masyarakat bukan hukumnya. Misalnya kajian tentang interaksi sosial, maka yang dilihat terlebih dahulu adalah bagaimana interaksi sosial itu pada faktanya secara empiris berjalan dalam masyarakat, hukum baru dilihat kemudian. Bagi disiplin ini, hukum sangat tergantung dengan masyarakat.

Sedangkan *sociological jurisprudence* adalah ilmu hukum sosiologis, yang merupakan cabang ilmu hukum. Olehnya itu yang digunakan adalah metodologi ilmu hukum. Ilmu ini memfokuskan diri pada pembuatan hukum dan prinsip-prinsipnya dan keberlakuan secara efektif di masyarakat. Para pemikir dari *sociological jurisprudence* melihat bahwa hukum harus berjalan seiring dengan perubahan masyarakat. Mereka menyerang formalisme dan legalisme. Contoh dari kajian ini

adalah kajian Pound. Pertama-tama ada postulasi yang sifatnya normatif, lalu postulat normatif tersebut dilihat dalam masyarakat. Jadi pertama-tama berangkat dari hukumnya, normanya apa, dan itu tidak selalu hukum positif.<sup>34</sup>

Perkembangan aliran hukum sosiologis, sebagai respon terhadap hukum normatif yang dianut oleh aliran positivisme hukum, tidak lepas dari peran yang dimainkan para tokoh yang beraliran sosiologis. Disisi lain penulis lebih condong kepada teori “form of domination” yang digagas oleh pakar sosiologi hukum yaitu Max Weber seorang Filsuf dari Jerman, Weber melihat bahwa hukum (hukum positif / peraturan perundang-undangan) tidak hanya berdimensi normatif tetapi juga dipengaruhi oleh dimensi lain seperti politik, agama dan ekonomi. Jadi hukum, berkembang dalam dimensi normatif dan non-normatifnya. Karena itu, Weber membedakan antara doktrin hukum dan sosiologi hukum.

Doktrin hukum berusaha untuk menumbuhkan, mengembangkan dan memantapkan makna intrinsik yang terkandung dalam peraturan hukum dan menjaga konsistensi logisnya berkaitan dengan peraturan hukum lainnya yang berada dalam satu sistem yang sama. Sementara, Sosiologi hukum mencoba memahami tingkah laku (*behaviour*) anggota masyarakat berkaitan dengan hukum yang dilaksanakan dan mencari keyakinan masyarakat yang seperti apa yang membuat hukum dapat *valid/sah*.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Cahyadi dan Fernando, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007.hlm 121

<sup>35</sup> Cahyadi dan Fernando, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007.hlm 98-99

Weber membahas perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum dengan membagi 3 tahap dari *"form of domination"*-nya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :<sup>36</sup>

No .	Tahap	Bentuk Legitimasi	Bentuk Administrasi	Dasar Ketataannya	Bentuk Proses Peradilan	Bentuk Keadilan	Tipe Pemikiran Hukum
1.	Tradisional	Tradisional, otoritas pribadi raja atau ratu	Patrimonial, asas turun temurun.	Tradisional, beban kewajiban yang sifatnya individual	Empiris, substantif, dan personal.	Empiris	Formal – irrasional dan substantive rationality.
2.	Kharismatik	Otoritas yang kharismatik dengan kesetiaan personal.	Tidak mengenal administrasi, tetapi hanya mengenal rutinisasi dari kharisma.	Respons terhadap karakter-karakter yang bersifat sosiopsikologis dari individu	Pewahyuan (revelations), empiric al justice formalism	Keadilan, kharismatik	Formal – irrasional, substantantif - irrasional
3.	Rasional Legal	Rasional – Legal, otoritas bersumber pada sistem hukum, yang diperankan secara rasional dan sadar.	Birokrasi dan profesionalisme.	Impersonal (not to individual, not to office).	Rasional. Pelaknaan secara rasional.	Aturan-aturan yang abstrak melalui staf yang profesional.	Formal – rationality (Logical Formal Rationality)

Tabel 1 : Analisa Penulis Terhadap Pemikiran Max weber

Berdasarkan tabel di atas, dipahami bahwa Weber mengklasifikasikan kecenderungan umum dalam perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum

<sup>36</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), h. 283-

dari yang bersifat tradisional, dengan tipe pemikiran hukumnya yang formal-irrasional, karena didominasi oleh otoritas raja, mengalami kemajuan dalam perkembangan hukum modern yang semakin rasional.

Dalam perkembangan yang berkaitan dengan *form of domination*-nya Weber, mengaitkannya kepada tiga tipe dasar dari kekuasaan yang sah, yaitu:<sup>37</sup>

1. Kharismatis, yang bertumpu pada kesetiaan kepada keistimewaan yang menonjol dari seseorang dan kepada tatanan yang dikeluarkan oleh orang yang menjadi sanjungan kesetiaan itu.
2. Tradisional, didasarkan pada kepercayaan yang telah mapan dan melembaga mengenai tradisi turun-temurun, termasuk kepercayaan kepada legitimasi dari mereka yang menjalankan kekuasaan atas dasar tradisi itu.
3. Rasional, yang bertumpu pada kepercayaan terhadap kesahihan pola-pola dari kaidah-kaidah normatif dan terhadap hak dari mereka yang memiliki otoritas, untuk mengeluarkan perintah-perintah.

Weber membagi 2 permasalahan dalam sosiologi hukum yaitu berdasarkan ;

1. Pada Suatu Lokasi,
2. Pada Sifat Aktivitas-Aktivitasnya

Khususnya dalam masyarakat modern, kekuasaan untuk memaksa, termasuk kekuasaan untuk menghilangkan nyawa seseorang berdasarkan kesalahan atas suatu kejahatan berat, disediakan bagi hukum dan perlengkapan penegakan hukum, negara. Oleh karena itulah, sehingga Weber mendefinisikan negara modern sebagai:

*“The monopoly of control of society’s means of force and violence under the control of law.”*

---

<sup>37</sup> Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 225

(Monopoli pengendalian terhadap alat-alat perlengkapan kekuasaan dan masyarakat dan monopoli terhadap penggunaan kekerasan yang berada di bawah pengendalian hukum.)

Setelah pengkajian Teori Max Weber, penulis bermaksud mengadopsi pendapat tersebut untuk membedah tinjauan sosiologi hukum terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian di Kota Makassar, dalam teori *“form of domination”* Weber adanya tiga tahap perkembangan sosiologi hukum masyarakat, dalam hal ini Kota Makassar yang telah mencapai umur era milenial masuk dalam tahap Rational Legal, dimana Peraturan Hukum dibuat oleh Pemangku kekuasaan yang dipoles oleh pengamat hukum dengan tinjauan analisa kondisi dan aktifitas masyarakat tanpa melupakan norma yang berkembang di Kota Makassar.

Kajian Weber terhadap sosiologi hukum membagi dua dialektika yang memuat sebuah diskursus antara sosiologi hukum dan doktrin hukum.

Sosiologi Hukum	Doktrin Hukum
1. Kausalitas : Ekonomi Edukasi 2. Kultur : Nilai 3. Patologi Sosial	1. Aturan Hukum 2. Penegak Hukum 3. Pelaksanaan : Persuasif Preventif Represif

*Tabel 2 : Analisa Penulis Terhadap Pemikiran Max Weber*

Dari hasil pengamatan table 2 dapat penulis simpulkan bahwa sosiologi hukum menganggap pelaku residivis tindak pidana begal di Kota Makassar sangat dipengaruhi oleh dialektika antara doktrin hukum dan masyarakat itu sendiri.

Sosiologi hukum menganggap bahwa dalam pandangan masyarakat pun perlu peningkatan doktrin hukum agar supaya masyarakat dapat memahami bahaya dari begal itu sendiri.

Dari tinjauan kausalitas atau teori sebab akibat dapat kita menarik 3 benang merah yang mempengaruhi tindak criminal masyarakat dikota masyarakat,

a. Ekonomi

Kemampuan ekonomi beberapa masyarakat yang tak mampu memenuhi kebutuhannya secara sadar akan melakukan tindak pidana seperti begal. Salah satu masyarakat Kota Makassar saudara Hasmadi menanggapi bahwa permasalahan ekonomi adalah yang paling utama dari kejadian begal tersebut, perihal residivis yaitu tak adanya wadah untuk memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat.

b. Edukasi

Edukasi atau penanaman nilai pendidikan juga sangat mempengaruhi tingkat pemikiran agar masyarakat visioner, dan tak keterbelakangan intelektual.

Dari edukasi ini muncul kesadaran akan pentingnya saling menjaga antar ummat manusia. Dari sinilah para penerus bangsa harus dibarengi dengan edukasi yang tinggi.

Dari Tinjauan Kultur atau budaya yang cikal bakalnya adalah kebiasaan, dengan watak yang keras atau tendensi tempramen yang menguasai kultur budaya masyarakat sehingga bisa dikatakan tindak criminal sangat tinggi, terbukti dari tahun ketahun presentasi kasus Pencurian dengan Kekerasan di Polrestabes Kota Makassar ,

Jumlah Kasus Tahun 2015

Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kasus	2	3	3	4	-	-	-	2	2	6	2	4
Jumlah	28 Kasus											

*Sumber data Polrestabes Kota Makassar*

#### Jumlah Kasus Tahun 2016

Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kasus	2	4	3	4	3	-	2	1	-	-	-	-
Jumlah	19 Kasus											

*Sumber data Polrestabes Kota Makassar*

#### Jumlah Kasus Tahun 2017

Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kasus	3	1	1	11	5	4	4	7	12	6	14	9
Jumlah	77 Kasus											

*Sumber data Polrestabes Kota Makassar*

#### Jumlah Kasus Tahun 2018

Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kasus	5	11	12	9	8	21	13	14	10	12	8	11
Jumlah	134 Kasus											

*Sumber data Polrestabes Kota Makassar*

### Jumlah Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tahun	2015	2016	2017	2018
Jumlah Pelaku	3 Pelaku	2 Pelaku	6 Pelaku	12 Pelaku

*Sumber data Polrestabes Kota Makassar*

Dari hasil Tabel diatas dapat Penulis simpulkan bahwa kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar mengalami siklus meningkat ditahun 2017 dan 2018. Dimana ditahun 2015 dan 2016 dibawah angka 50 sedangkan 2017 mencapai 77 kasus dan 2018 ada 134 kasus. Namun demikian Pelaku Begal sama halnya siklus dari table diatas menjelaskan tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan, hasil pengamatan penulis menganggap bahwa penyebab jangka panjang yaitu kultur, edukasi dan ekonomi, namun ada perdebatan dikalangan elit yaitu adanya perputaran konstalasi politik karena ditahun 2018 momentum Pilwalkot yang mewarnai gonjang ganjing kriminal sebagai salah satu variable menggoyahkan struktural pemerintahan.

Dari Hasil Wawancara oleh Kapolrestabes Makassar dan Wakasatreskrim menjelaskan Sedikit Stigma Masyarakat kota Makassar,

Dalam lingkungan masyarakat prilaku orang yang tidak sesuai dengan norma atau tidak seharusnya dikatakan sebagai prilaku yang menyimpang, dampak dari penyimpangan prilaku tersebut kemudian memunculkan berbagai akibat yaitu positif dan negatif. Akibat positif dari adanya hal tersebut selalu terjadi perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek sosial, sehingga dapat mengasah kreatifitas manusia untuk mengatasinya, sedangkan dampak negatif dari penyimpangan prilaku menjurus kepada pelanggaran hukum kemudian menimbulkan ancaman ketenangan



lingkungan sekitar atau mengganggu ketertiban masyarakat, yang mana kerap menimbulkan respon tertentu bagi masyarakat yang merasa terganggu atau terancam ketenangannya.

Salah satu respon dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakatnya kemudian memunculkan stigmatisasi terhadap individu yang melakukan perilaku yang menyimpang tersebut. Stigmatisasi tersebut merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah seorang yang jahat. Lebih jauh dan lebih dalam lagi pemberian cap ini dialami oleh pelanggar hukum yang bersangkutan, lebih besar kemungkinan ia menghayati dirinya sebagai benar-benar pelanggar hukum yang jahat dan pada gilirannya yang lebih besar lagi penolakan masyarakat terhadap yang bersangkutan sebagai anggota masyarakat yang tidak dapat dipercaya.

#### **B. Pandangan Masyarakat dan Instansi Terkait Untuk Meminimalisir Terjadinya Residivis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Kota Makassar**

Masyarakat kota Makassar menganggap bahwa Pelaku Residivis hanya kurang dibekali wadah untuk mengaplikasikan keahliannya sehingga tak ada lagi pikiran untuk melakukan tindak Kriminal, “Hasil wawancara bersama bapak Palancoi”

Seharusnya Kepolisian Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar seharusnya memiliki strategi khusus untuk menumpas begal dan Pelaku residivis “hasil wawancara Bersama Bapak Amiruddin”

Dari hasil wawancara masyarakat Kota Makassar penulis secara langsung mengonfirmasi masalah tersebut kepada instansi terkait sehingga terjadi yang namanya siklus feedback antara Penegak Hukum dan Masyarakat itu sendiri.

#### 1. Strategi Polrestabes Makassar Terkait Pencurian dengan Kekerasan

Strategi dalam melaksanakan sosialisasi kewaspadaan masyarakat pada isu tindak kriminal begal yaitu melakukan partoli dan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar selalu berhati-hati terhadap kriminal begal dengan cara memberikan informasi melalui media cetak seperti sepanduk, koran yang bekerja sama dengan Media Makassar dan menggunakan radio agar bisa memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat tentang berbagai kejadian kriminal begal agar masyarakat mampu meningkatkan kesadaran diri untuk berhati-hati terhadap kriminal begal sehingga tidak menjadi korban.

Dalam melaksanakan sosialisasi kewaspadaan masyarakat pada isu tindak kriminal begal dimana terlebih dahulu Polrestabes mengadakan rapat penentuan dan penjadwalan anggota tim yang melakukan patroli dan menentukan tim yang memberikan penyuluhan tentang bahaya kriminal begal kepada kelompok-kelompok masyarakat melalui kelurahan sehingga perencanaan yang ditentukan sesuai dengan tugas yang Polrestabes diterapkan. Adapun tugas Polrestabes Kota Makassar yaitu memberikan pelayanan informasi demokrasi humas Polresta dan melakukan pembinaan kepada masyarakat.

Adapun program yang diterapkan Polrestabes Kota Makassar untuk mewujudkan masyarakat terbebas dari kriminal begal yaitu meningkatkan kualitas penegakan hukum di bidang kriminal; meningkatkan pendayagunaan potensi dan kemampuan masyarakat dalam melakukan interaksi dengan pihak

kepolisian meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi sebagai sarana informasi tindakan kejahatan bagi masyarakat melakukan upaya dukungan koordinasi, kualitas kemampuan sumberdaya manusia, administrasi, anggaran, sarana dan prasarana dengan masyarakat membangun sistem dan model perencanaan dan pengembangan partisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan kriminal begal menyelenggarakan kampanye nasional dan sosialisasi tentang kriminal begal dan mengembangkan penyidikan dan penegakan hukum di bidang kriminal begal.

Faktor penghambat Polrestabes Kota Makassar melakukan sosialisasi kewaspadaan masyarakat pada isu tindak kriminal begal yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk memperhatikan berbagai informasi yang sudah diberikan oleh pihak kepolisian agar bisa meminimalisir tindakan kejahatan. Kegiatan pokok yang dilakukan polisi untuk mencegah faktor penghambat strategi yaitu; pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat anti kejahatan; pemberdayaan anggota masyarakat untuk pengamanan swakarsa; dan pemberian bimbingan dan penyuluhan keamanan.

Dalam mengurangi faktor penghambat Polrestabes Kota Makassar melakukan sosialisasi kewaspadaan masyarakat pada isu tindak kriminal begal maka program rencana strategi yang digunakan harus mampu mewujudkan penegakan supremasi hukum dalam menghadapi tindak kriminalitas serta pelanggaran hukum lainnya. Kegiatan pokok yang dilaksanakan yaitu; melakukan intensifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta pelanggaran hukum secara non diskriminatif; menyelenggarakan penanggulangan dan penanganan terhadap kejahatan transnasional; dan melakukan koordinasi

dengan ketua RT, RW dan lurah sehingga pengawasan teknis penyidik kepolisian dalam memberantas kriminal begal bisa berkurang dan ditangani oleh pihak kepolisian.

Untuk menyikapi isu tindak kriminal begal maka polres memiliki strategi dalam pemulihan keadilan dapat meningkatkan perdamaian karena menunjukkan bahwa Polrestabes Kota Makassar bertindak sebagai fasilitator, bukan hanya penghukum yang menjurus represif melainkan mengutamakan perdamaian bagi penanggulangan konflik dan ketidaktertiban, polresta bertujuan mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asai manusia.

## 2. Strategi Lapas Kelas I Kota Makassar

Narapidana atau mantan narapidana walaupun dibekali dengan keterampilan khusus namun tidak disertai dengan penyaluran ke bursa kerja ataupun pemberian modal sehingga mantan narapidana tidak dapat mengembangkan bakat dan keterampilannya, padahal satu-satunya peluang bagi mantan narapidana adalah berwiraswasta atau membuka usaha sendiri yang kemudian dari dalam diri mantan narapidana muncul persepsi bahwa dirinya tidak lagi diterima di lingkungannya dan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan serta satu-satunya jalan adalah mencari jalan pintas yaitu mengulangi lagi perbuatannya dengan melanggar hukum.

### a. Tahap-tahap pembinaan lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar

Pembinaan yang dilakukan harus berdasarkan pada Pancasila dan konsep pemasyarakatan. Pada hakikatnya proses pembinaan

narapidana dimulai sejak narapidana tersebut masuk ke lembaga pemasyarakatan sampai berakhirnya masa pidana (bebas). Tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pembinaan narapidana adalah admisi dan orientasi atau pengenalan, tahap pembinaan, tahap asimilasi, dan tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat.<sup>10</sup>

Tahap-tahap dari pembinaan tersebut yaitu:

1) Tahap admisi dan orientasi atau pengenalan

Tahap ini lebih dikenal dengan istilah Mapenaling (masa pengenalan lingkungan). Setiap narapidana yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan diberi pengarahan tentang situasi di dalam lembaga pemasyarakatan, blok mana yang harus ditempati oleh narapidana tersebut, hak dan kewajibannya, dan peraturan-peraturan yang ditetapkan di lembaga pemasyarakatan. Tujuannya adalah agar dapat memperbaiki tingkah laku narapidana dan mengarahkannya ke jalan yang benar.

Pada tahap ini narapidana akan diteliti tentang segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab melakukan tindak pidana, tempat tinggal narapidana, situasi ekonominya, latar belakang pendidikan, dan sebagainya. Untuk keperluan admisi dan orientasi narapidana ditempatkan di blok khusus (karantina), maksudnya di samping untuk keperluan pembinaan dan juga untuk keperluan pemeriksaan kesehatan apakah ada penyakit yang menular atau tidak.

Admisi dan orientasi merupakan tahap yang kritis bagi narapidana yang baru masuk ke lembaga pemasyarakatan, karena dari dunia luar yang bebas dan luas memasuki situasi lembaga pemasyarakatan yang sempit dan terkekang. Pada tahap ini dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat (*maximum security*). Narapidana akan merasakan hilangnya kebebasan, pelayanan, dan lain-lain. Sangat diharapkan agar narapidana dapat menyesuaikan diri dalam masa transisi tersebut, sehingga dapat hidup secara normal di lembaga pemasyarakatan.

Pada tahap ini juga ditunjuk seorang petugas untuk menjadi wali dari narapidana dan bertindak sebagai pendamping, sehingga apabila narapidana mengalami kesulitan atau masalah dapat disampaikan ke walinya untuk mendapat pengarahan atau jalan keluar dari masalah tersebut. Tahap ini dilakukan sejak awal masuk sampai 1/3 dari masa pidana.

## 2) Tahap pembinaan

Tahap pembinaan merupakan kelanjutan dari tahap admisi dan orientasi. Tahap ini dilakukan apabila narapidana telah menjalani 1/3 masa pidana sampai 1/2 masa pidananya dengan *medium security*. Bentuk-bentuk pembinaan diantaranya, pembinaan kepribadian (mental dan spiritual) serta pembinaan kemandirian. Untuk kepentingan pembinaan narapidana akan didata mengenai bakat dan minatnya masing-masing dan juga jenjang pendidikan yang pernah ditempuh.

### 3) Tahap asimilasi

Pembinaan narapidana pada tahap ini dapat dimulai dari 1/2 masa pidana sampai 2/3 dari masa pidananya dan menurut penilaian team pembinaan pemasyarakatan sudah memiliki kemajuan fisik, mental, dan keterampilan. Pada tahap ini pengawasan terhadap narapidana relatif berkurang (*minimum security*).

Asimilasi secara harafiah adalah diperdayakan. Asimilasi diklasifikasikan menjadi 2 bentuk yakni asimilasi di dalam lembaga pemasyarakatan, dan asimilasi luar lembaga pemasyarakatan. Narapidana yang menjalani asimilasi di dalam lembaga pemasyarakatan, diantaranya narapidana yang bekerja di kantor-kantor di dalam lembaga pemasyarakatan, dan narapidana yang mengajar di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan untuk asimilasi di luar kegiatannya dapat berupa kerja pada salah satu pabrik, kerja bakti bersama masyarakat, kerja sendiri, dan lain-lain. Khusus untuk tahun 2012 ini, kegiatan asimilasi luar diantaranya bekerja di kebun pertanian milik Lembaga Pemasyarakatan kelas I Makassar dan bekerja di sekitar lembaga pemasyarakatan seperti menjaga parkir di halaman depan Lembaga Pemasyarakatan kelas I Makassar.

Pada tahap ini program pembinaan diperluas, bukan saja di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, tetapi juga membaurkan, narapidana dengan masyarakat tertentu. Program ini dilaksanakan secara bertahap mulai dari kegiatan yang sempit lingkungannya dan mengarah

pada kegiatan masyarakat yang lebih luas sesuai dengan bakat dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing narapidana. Dalam melaksanakan setiap program kegiatan asimilasi, petugas atau pembina pemasyarakatan harus selektif dan kegiatan tersebut harus direncanakan secara matang dan terpadu. Hal ini bertujuan agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada narapidana dan merugikan masyarakat dimana narapidana tersebut diasimilasikan.

#### 4) Tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat

Tahap ini adalah tahap akhir pada proses pembinaan narapidana dan dikenal dengan istilah integrasi. Apabila proses pembinaan dari tahap admisi dan orientasi atau pengenalan, pembinaan, asimilasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani  $\frac{2}{3}$  atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana tersebut diberikan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Dalam tahap ini proses pembinaannya dilaksanakan di masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat.

Pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan di bawah pengawasan langsung oleh balai pemasyarakatan bukan lagi pihak lembaga pemasyarakatan. Narapidana dapat menjalani sisa dari masa pidana atau  $\frac{2}{3}$  di rumah dan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, selain itu narapidana yang bersangkutan harus wajib melaporkan diri ke balai pemasyarakatan. Jika pada tahap integrasi



tersebut narapidana kembali melakukan tindak pidana, maka narapidana tersebut harus kembali menjalani sisa masa pidananya itu di dalam lembaga pemasyarakatan, ditambah lagi dengan sanksi pidana yang baru dilakukan tersebut. Tahap-tahap pembinaan tersebut diatas secara umum dapat dikatakan sebagai tahap pembinaan standart yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas I Makassar dalam membina warga binaan.

Namun berbeda lagi dengan narapidana recidive, dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa khusus untuk narapidana recidive sendiri pada umumnya mendapatkan pembinaan yang sama dengan narapidana lainnya, tetapi perbedaannya hanya terletak pada saat pelaksanaan baik pembinaan asimilasi maupun pembinaan integrasi. Perbedaan tersebut yaitu bila narapidana recidive untuk mendapatkan pembinaan asimilasi dirasakan masih sangat sulit. Hal tersebut disebabkan oleh karena status narapidana recidive itu sendiri yang menyebabkan pihak lembaga pemasyarakatan harus lebih ekstra lagi dalam memberikan pembinaan. Padahal disisi lain pembinaan asimilasi tersebut merupakan salah satu hak bagi warga binaan untuk mendapatkannya.

Mengenai hak asimilasi tersebut, penulis mendapatkan informasi yang diberikan oleh salah satu narapidana recidive yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Makassar. Narapidana recidive tersebut mengatakan bahwa untuk mendapatkan asimilasi itu dirasakan sangat sulit sekali, selain statusnya sebagai residivis. Sulitnya narapidana

recidive untuk mendapatkan haknya juga terjadi pada hak untuk mendapatkan pembinaan integrasi, dimana pembinaan tersebut sangat berpengaruh sekali pada mental para narapidana karena pembinaan tersebut berperan sangat penting bagi nara pidana untuk dapat merasakan secara langsung dekat dengan masyarakat maupun dengan keluarganya agar tidak selalu merasa kalau statusnya sudah menjadi narapidana maka semua orang pasti sudah tidak mau lagi menerimanya dan sulit untuk dipercaya lagi sehingga membawa dampak yang kurang baik seperti adanya kemungkinan bahwa karena narapidana tersebut sudah merasa seperti yang disebutkan diatas dan kemudian mengulangi kembali perbuatannya, pada akhirnya memiliki status sebagai residivis.

Hal ini bukan hanya terjadi pada narapidana recidive saja namun berlaku juga bagi narapidana-narapidana lainnya. Jadi, walaupun ada narapidana recidive yang mendapatkan hak asimilasi maupun hak integrasi itu pun pasti narapidana yang tingkat ekonominya menengah keatas yang sanggup memenuhi nominal biaya kepengurusan berkas yang ditawarkan tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### C. Kesimpulan

Adapun Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian skripsi oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Teori Max weber , tentang tinjauan sosiologi hukum terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian dikota makassar, dalam teori "*form of domination*" Weber adanya tiga tahap perkembangan sosiologi hukum masyarakat, dalam hal ini Kota Makassar yang telah mencapai umur era milenial masuk dalam tahap Rational Legal, dimana Peraturan Hukum dibuat oleh Pemangku kekuasaan yang dipoles oleh pengamat hukum dengan tinjauan analisa kondisi dan aktifitas masyarakat tanpa melupakan norma yang berkembang di Kota Makassar, dari hal tersebut maka Dialektika antara Sosiologi (Masyarakat) dan Doktrin Hukum sebagai pengaruh yang besar untuk menyorot Kajian terhadap Pelaku residivis tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan (begal) di Kota Makassar
2. Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar mengalami siklus meningkat ditahun 2017 dan 2018. Dimana ditahun 2015 dan 2016 dibawah angka 50 sedangkan 2017 mencapai 77 kasus dan 2018 ada 134 kasus. Namun demikian Pelaku Begal sama halnya siklus dari table diatas menjelaskan tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 12 Pelaku , hasil pengamatan penulis menganggap bahwa penyebab jangka panjang yaitu kultur, edukasi dan ekonomi, namun ada perdebatan dikalangan elit yaitu adanya perputaran konstalasi politik karena ditahun 2018 momentum

Pilwalkot yang mewarnai gonjang ganjing kriminal sebagai salah satu variable menggoyahkan struktural pemerintahan. Dalam lingkungan masyarakat perilaku orang yang tidak sesuai dengan norma atau tidak seharusnya dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang, dampak dari penyimpangan perilaku tersebut kemudian memunculkan berbagai akibat yaitu positif dan negatif. Akibat positif dari adanya hal tersebut selalu terjadi perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek sosial, sehingga dapat mengasah kreatifitas manusia untuk mengatasinya, sedangkan dampak negatif dari penyimpangan perilaku menjurus kepada pelanggaran hukum kemudian menimbulkan ancaman ketenangan lingkungan sekitar atau mengganggu ketertiban masyarakat, yang mana kerap menimbulkan respon tertentu bagi masyarakat yang merasa terganggu atau terancam ketenangannya. Dalam melaksanakan sosialisasi kewaspadaan masyarakat pada isu tindak kriminal begal dimana terlebih dahulu Polrestabes mengadakan rapat penentuan dan penjadwalan anggota tim yang melakukan patroli dan menentukan tim yang memberikan penyuluhan tentang bahaya kriminal begal kepada kelompok-kelompok masyarakat melalui kelurahan sehingga perencanaan yang ditentukan sesuai dengan tugas yang Polrestabes diterapkan. Adapun tugas Polrestabes Kota Makassar yaitu memberikan pelayanan informasi demokrasi humas Polresta dan melakukan pembinaan kepada masyarakat. Sedangkan Dilapas Kota Makassar melakukan pembinaan Tahap admisi dan orientasi atau pengenalan, Tahap pembinaan, Tahap asimilasi dan Tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat.

#### D. Saran

Adapun saran yang penulis ingin sampaikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat Kota Makassar agar bisa lebih mengedepankan nilai ,norma dan kaidah yang telah lama diwariskan oleh pendahulu dengan menjunjung rasa persaudaraan, serta peduli terhadap pendidikan dan sesama manusia. Kepedulian sosial sangat dibutuhkan untuk bersama saling menjaga satu sama lain.
2. Pemerintah lebih memperhatikan warga masyarakat untuk memberikan wadah pekerjaan agar aktivitas bisa dibebankan kemasyarakat sehingga aktivitas komersil itu bisa menunjang nilai ekonomi masyarakat dan potensi kriminal akan berkurang.
3. Penegak hukum seperti kepolisian dan Lapas kelas I Kota Makassar telah memberikan strategi untuk meminimalisir Pelaku residivis tindak pidana pencurian dengan kekerasan namun siklus tahun 2018 tak bisa dibendung maka dari itu kinerja masih perlu ditingkatkan apalagi jam malam yang perlu diperketat penjagaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang .Bayu Media.2003)
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002),
- Ali, Prof. Dr. H. Zainuddin.. *Sosiologi Hukum*. (Jakarta.Sinar Grafika. 2005)
- Anwar, Yesmil.Pengantar Sosiologi Hukum. (Jakarta. Grasindo. 2008)
- Cahyadi dan Fernando, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- DirjosisworoSoedjono, *Kriminologi (pencegahantentangsebab-sebabKejahatan)*,  
(1985)
- Dahlia Haliah Ma'u Muliadi Nur.Paradigma Hukum Sosiologis (Upaya Menemukan  
Makna Hukum Dari Realitas Publik. Jurnal.2015.  
[https://www.google.co.id/search?safe=strict&ei=F9ZjXP78NZqlwgP8uomQCQ&q=sosiologi+hukum+jurnal+pdf&oq=sosiologi+hukum+jurnal+pdf&gs\\_l=psy-ab.3..0j0i22i30l2.3571.9329..9682...0.0..0.119.1456.0j13.....0....1..gws-wiz.....0i71j35i39j0i67.CUx4l\\_PILl4](https://www.google.co.id/search?safe=strict&ei=F9ZjXP78NZqlwgP8uomQCQ&q=sosiologi+hukum+jurnal+pdf&oq=sosiologi+hukum+jurnal+pdf&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30l2.3571.9329..9682...0.0..0.119.1456.0j13.....0....1..gws-wiz.....0i71j35i39j0i67.CUx4l_PILl4)(Januari 2019)
- Farid, Abidin Zainal.*Hukum Pidana I*. (Jakarta. Sinar Grafika. 1995)
- H. Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.2010 )
- Laily Lolita Sari, *Pengaruh harapan terhadap kecenderungan residivis Pada narapidan*.[https://www.researchgate.net/publication/326405538\\_Pemahaman\\_Dasar\\_Tentang\\_Sosiologi\\_Hukum](https://www.researchgate.net/publication/326405538_Pemahaman_Dasar_Tentang_Sosiologi_Hukum) (Jurnal.2017)

Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan,( Jakarta.Sinar Grafika,2009)

Mastur, Sh,Mh., *Peranan Dan Manfaat Sosiologi Hukum Bagi Aparat Penegak Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti*, Fak. Hukum Universitas Wahid Hasyim (Semarang 2013. )

Maxmen, Jerrold S.. *Essential Psychopathologi*. (New York: W. W. Norton & Company. 1986 )

MulyanaW.Kusuma, *KriminologidanmasalahKejahatan*. (Armico. Bandung1984)

OK. Khairuddin, , *Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1991)

Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006),

R. Soesilo, *KUHP dan Komenta-Komentarnya Lengkap*, (Bogor . Politei.1996)

Roni. *Hirabah (begal) dalam Perspektif islam*,(*Jurnal*.2018)

S.R. Sianturi, , *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta, Alumni Ahaem- Petehean, 1986)

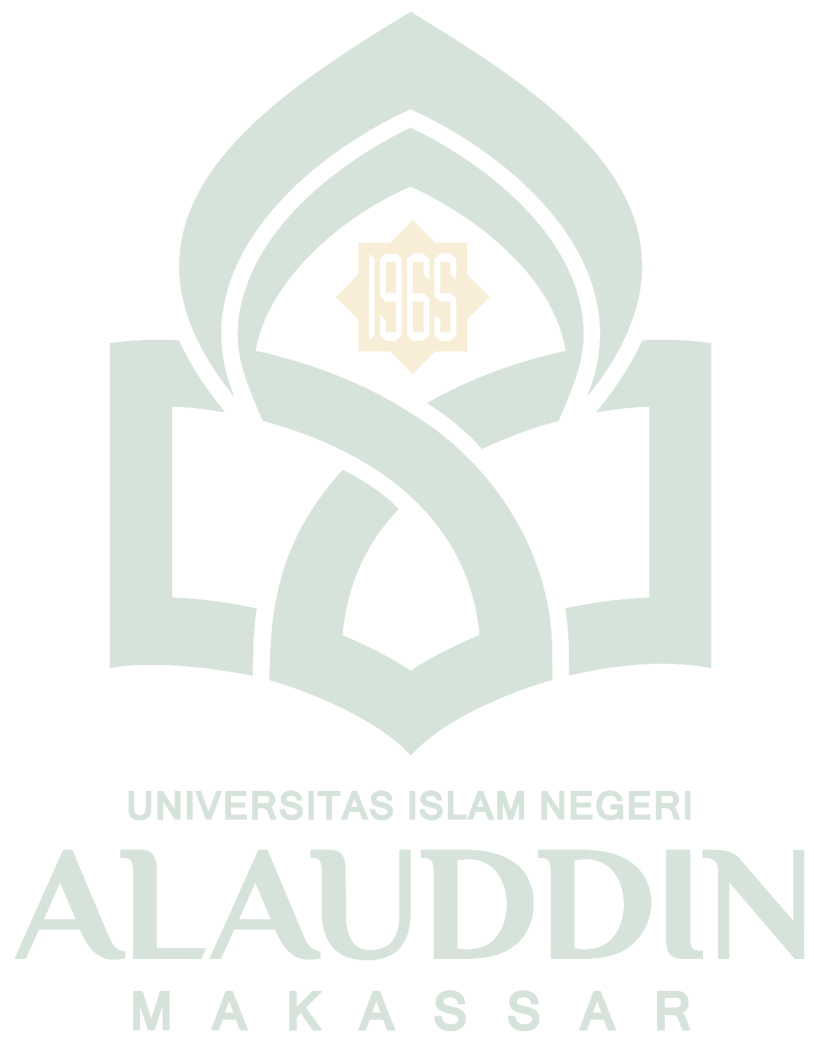
Santoso T danZulfa E.A. *Kriminologi*.(Jakarta .GrafindoPersada.2001.)

Teguh Prasetyo, , *Hukum Pidana*, (Jakarta.Rajawali Pers. 2010)

Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat. Pustaka Pelajar*. (Yogyakarta 2013)

Wignjosoebroto, Soetandyo.. *Hukum: Paradigma, Metode Dan Masalah. Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologi (Huma)*. (Jakarta Zaini,2002)

Yesmil Anwar dan Adang, , Pengantar Sosiologi Hukum, Widiararana Indonesia,  
(Jakarta, PT. Gramedia.2008 )







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



Wawancara Bersama Kompol Dwi Ari Wibowo S.IK (Kapolrestabes Kota Makassar)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



Wawancara Warga Kota Makassar (Hasmadi)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## RIWAYAT HIDUP



Penulis Skripsi yang berjudul, “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA MAKASSAR (Studi kasus Polrestabes Tahun 2015-2018). Yang bernama ASRULLAH DIMAS dilahirkan di Bantaeng Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Maret 1996 dari ayah yang bernama Basir.S dan ibu bernama Hasni.

Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 7 Letta pada tahun 2003-2008. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat SMP Negeri 2 Bantaeng pada tahun 2008-2011. Dengan tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 2 Bantaeng tahun 2011-2014. Dengan tahun yang sama yakni tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan lulus difakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum hingga tahun 2018.

Karena keaktifan penulis selama menempuh jalur pendidikan banyak jabatan yang pernah penulis emban dengan tanggungjawab penuh yaitu, Wakil Ketua Osis SMP Negeri 2 Bantaeng Periode 2009-2010 , Ketua Osis SMA Negeri 2 Bantaeng Periode 2012-2013, Ketua Pramuka (Pradana) Ambalan Andi Mannappiang SMA Negeri 2 Bantaeng Periode 2012-2013 dan 2013-2014, Ketua Purna Paskibraka SMA Negeri 2 Bantaeng Periode 2013-2014, Presiden Alauddin Debate Association 2015-2016, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Periode 2016-2017, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Periode 2017-2018.